

KEMISKINAN PEDESAAN : METODOLOGI PENELITIAN

M. Djamhuri dan M. Y. Maamun

PENDAHULUAN

Walaupun Indonesia telah berhasil meningkatkan taraf hidup rakyatnya, namun untuk menurunkan jumlah penduduk miskin masih perlu terus diupayakan. Menurut Bank Dunia (1990) selama periode tahun tujuh puluhan sampai delapan puluhan Indonesia telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 60% menjadi 20%. Ini berarti bahwa dengan jumlah penduduk sebesar 179,3 juta jiwa (Sensus Penduduk 1990), pada saat ini masih terdapat sekitar 35,8 juta penduduk yang tergolong miskin. Persoalan ini dapat menghambat proses pembangunan selanjutnya. Selain itu juga akan menurunkan produktifitas dan kualitas sumberdaya manusia.

Di Indonesia persoalan kemiskinan muncul hampir di seluruh pelosok tanah air, termasuk di lahan pasang surut Kalimantan Selatan. Hasil kajian yang dilakukan oleh Kantor Statistik (BPS) bekerja sama BAPPEDA Propinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa pada lahan ini diperkirakan masih terdapat 29,36% penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu upaya peningkatan pendapatan penduduk yang difokuskan pada mereka yang tergolong penduduk miskin akan memberikan dampak yang besar bagi kemajuan pembangunan. Hal ini dikarenakan secara makro kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat meningkat, keterbelakangan berkurang dan pembagian pendapatan semakin merata. Dalam konteks memperkokoh landasan pembangunan, keberhasilan ini akan meningkatkan mobilitas sosial dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tingkat kemiskinan suatu individu atau sekelompok penduduk, yang tinggal di suatu wilayah, merupakan hasil akhir kemampuannya dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi yang tersedia, baik sumberdaya manusia, sumber daya alam maupun infrastruktur fisik dan infrastruktur sosial. Pada giliran berikutnya, kemiskinan itu sendiri akan menurunkan kuantitas dan kualitas sumberdaya ekonomi tersebut. Seberapa jauh "lingkaran setan" ini terus berputar sangat tergantung pada upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan, yang mana ketepatan strategi yang digunakan dan program yang diusulkan sangat ditentukan oleh

kejelian, kecermatan dan ketelitian mengidentifikasi sumberdaya ekonomi yang dikuasai kelompok penduduk miskin tersebut.

Dalam konstelasi upaya untuk mengentaskan penduduk dari kemiskinan, umumnya ada tiga tujuan pokok yang secara bertahap akan dicapai dalam penelitian kemiskinan di kawasan lahan pasang surut, yaitu:

1. Mengetahui tingkat kemiskinan penduduk di lahan pasang surut berdasarkan pendapatan perkapita, status gizi, tingkat kesehatan, keadaan perumahan, pendidikan dan pengeluaran untuk konsumsi pangan.
2. Melakukan identifikasi dan karakterisasi jumlah dan mutu sumberdaya ekonomi (economic resources) dan infrastruktur yang dapat digali dan dialokasikan untuk menanggulangi kemiskinan, yang meliputi : sumber daya alam, sumberdaya manusia, infrastruktur dan kelembagaan.
3. Mendapatkan alternatif pemecahan masalah kemiskinan di wilayah lahan pasang surut melalui peningkatan jumlah dan kualitas sumberdaya dan infrastruktur.

Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut akan dapat diperoleh suatu priskripsi alternatif untuk mengentaskan penduduk dari kemiskinan yang sesuai dengan kondisi fisik lahan dan kondisi sosial ekonomi penduduk miskin di wilayah pasang surut.

KONSEP KEMISKINAN

Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Mubyarto, 1981). Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebutuhan akan pangan, pakaian, papan dan kebutuhan sosial lainnya.

Pemenuhan kebutuhan dasar sangat tergantung dari tingkat pendapatan keluarga/masyarakat. Tingkat pendapatan ini menentukan daya beli, dalam artian semakin tinggi tingkat pendapatan semakin tinggi pula kemampuan untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Atas dasar pengertian ini, mereka yang tergolong miskin pada dasarnya adalah keluarga/masyarakat yang pendapatannya sangat rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Terdapat beberapa kriteria kelayakan suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, atau penentuan "garis kemiskinan". Sajogyo (1974) me-

mentukan dengan ukuran pendapatan ekuivalen beras. Penduduk berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatannya dibawah 240 kg perkapita pertahun bagi daerah pedesaan atau 360 kg perkapita per tahun bagi daerah perkotaan. Sumitro Djojohadikusumo (1975) menggunakan patokan pendapatan, yaitu \$ 75 per kapita pertahun. Di samping itu masih terdapat berbagai ukuran lain, seperti yang dibuat oleh Biro Pusat Statistik, Anne Booth dkk, dan Mahar Manghaas, dkk.

Penggunaan pendapatan per kapita untuk mengukur tingkat kemiskinan suatu wilayah banyak mengandung kelemahan. Oleh karena itu beberapa peneliti melengkapi dengan indikator lain untuk mengukur mutu kehidupan fisik ini, antara lain status gizi, tingkat konsumsi pangan, pemilikan barang-barang tahan lama, konsumsi energi listrik, kualitas rumah, sumber air bersih, kelancaran transportasi dan komunikasi dengan wilayah pusat pertumbuhan.

Dengan demikian, indikator agregate yang digunakan untuk menganalisis tingkat kemiskinan dalam suatu wilayah adalah: (1) pendapatan perkapita, (2) kualitas rumah, (3) pendidikan anak, (4) tingkat kesehatan, (5) status gizi dan (6) kematian balita. Dengan asumsi bahwa semua indikator mempunyai peran yang sama dalam pengukuran wilayah miskin, maka keempat indikator tersebut tidak diberi bobot. Indikator ini tidak ditujukan untuk mengkaji nilai garis kemiskinan, tetapi ditujukan untuk mencari pemecahan masalah kemiskinan di suatu wilayah, dalam artian mencari upaya meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat miskin.

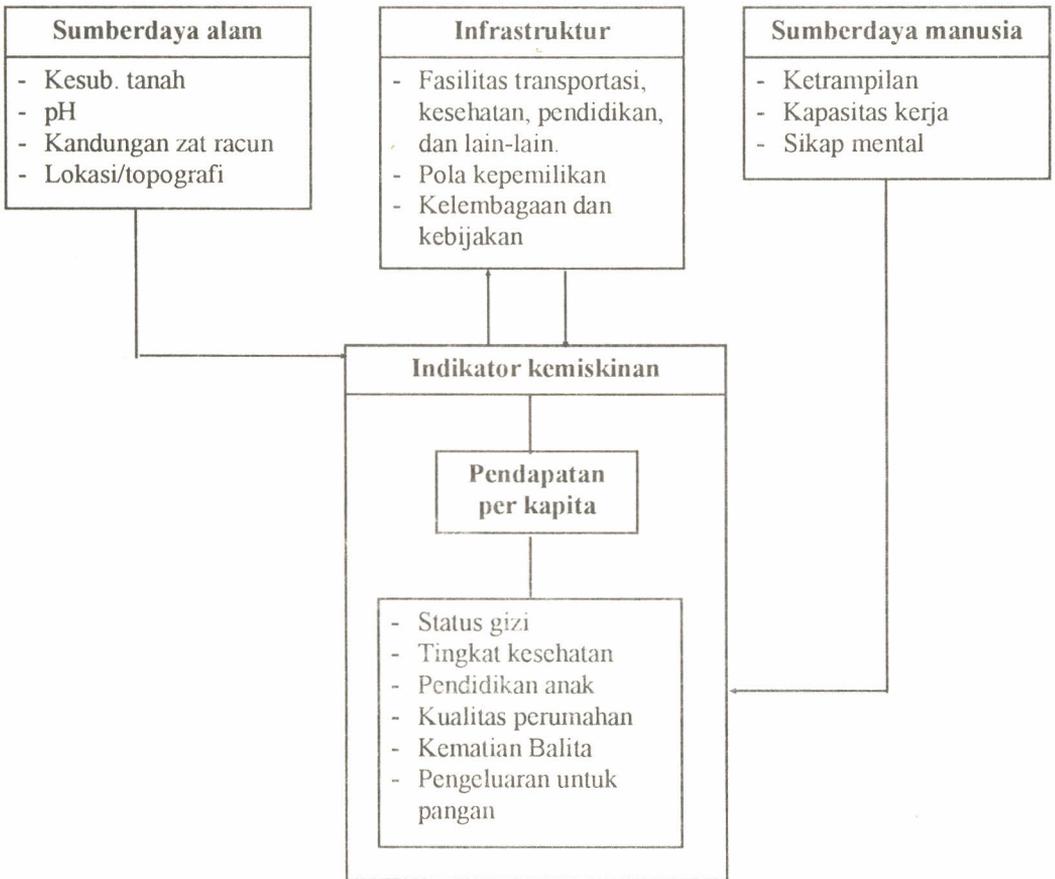
FAKTOR PENENTU KEMISKINAN

Tingkat kemiskinan suatu keluarga atau masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yang dapat dibagi menjadi faktor-faktor yang sifatnya umum, misalnya kondisi ekonomi, sosial, budaya dan politik (Prisma, 1976), dan faktor-faktor yang sifatnya subyektif. Faktor yang terakhir ini menyangkut kapasitas keluarga atau masyarakat itu dalam memanfaatkan sumberdaya yang dikuasai.

Jenis, mutu dan jumlah faktor penentu kemiskinan bervariasi dari satu individu ke individu lainnya dan dari satu tempat ke tempat lain. Faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan penduduk di suatu wilayah meliputi kualitas sumberdaya fisik lahan, sumberdaya manusia, teknologi, sarana/prasarana dan kelembagaan. Kualitas fisik lahan yang rendah menyebabkan rendahnya produktifitas, sehingga tidak dapat mendukung kehidupan yang layak di daerah yang

bersangkutan. Kemiskinan penduduk dapat pula bersumber dari tatanan kelembagaan yang kurang mendukung pemerataan pembagian pendapatan.

Selanjutnya, kemiskinan juga dapat disebabkan oleh terisolirnya suatu wilayah sehingga ongkos transaksi dengan pihak luar menjadi mahal, akibatnya transaksi ekonomi jarang terjadi. Masih banyak lagi akar penyebab yang perlu diketahui. Pengetahuan tersebut sangat penting mengingat implikasinya yang sangat besar terhadap kebijakan pengentasan penduduk dari kemiskinan. Gambaran yang agak menyeluruh tentang faktor penentu tingkat kemiskinan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Keterkaitan antar Berbagai Faktor Penentu Kemiskinan Penduduk di Lahan Pasang Surut Kalimantan Selatan.

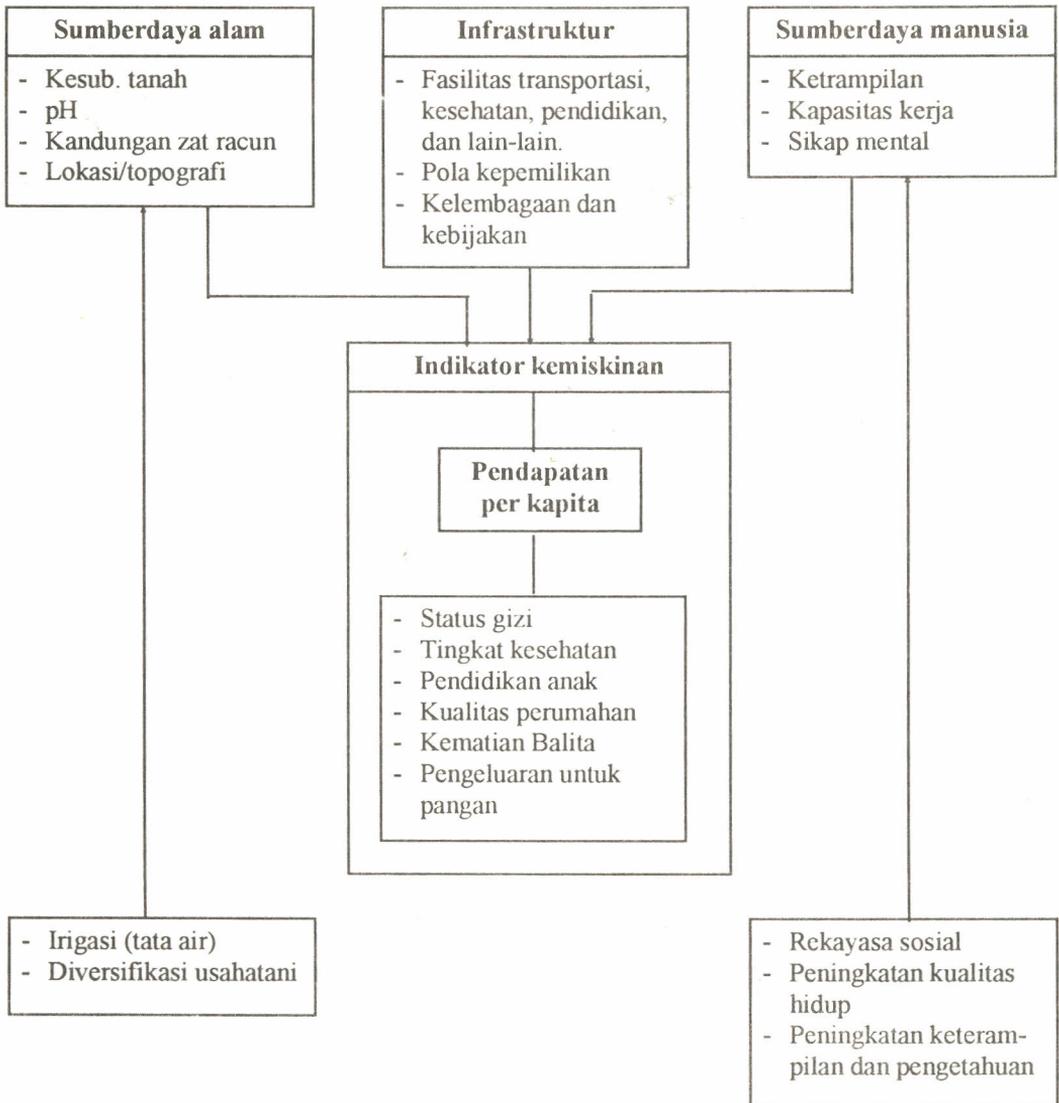
PENDEKATAN UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN

Dalam penelitian ini pendekatan alternatif untuk menanggulangi kemiskinan penduduk di lahan pasang surut bersifat komprehensif dan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan pragmatis. Dengan cara demikian preskripsi alternatif yang diperoleh dapat diuji keterandalannya di lapangan. Sehingga, disamping dapat diuji berdasarkan kaidah kejelasan atau konsistensi juga diharapkan dapat diuji berdasarkan kaidah keberhasilan (*workability*).

Pendekatan alternatif untuk menanggulangi kemiskinan penduduk sangat tergantung karakteristik yang melekat pada sumberdaya dan infrastruktur yang dimiliki penduduk tersebut. Karakteristik sumberdaya dan infrastruktur ini bersifat heterogen, variatif dan selalu berubah dari waktu ke waktu.

Penanggulangan kemiskinan diprioritaskan pada golongan melarat atau golongan yang berpendapatan sangat rendah (kurang dari Rp 25.000,-/kapita/perbulan). Golongan ini biasanya hidup dengan kualitas hidup yang sangat rendah dan tinggal pada lingkungan yang buruk (daerah kumuh). Oleh karena itu di samping membahayakan dirinya sendiri juga berbahaya bagi lingkungan keluarganya dan keluarga lainnya. Hal ini bisa terjadi mengingat lingkungan yang buruk biasanya menjadi sarang penyakit menular dan sejenisnya.

Sesuai dengan karakteristik yang melekat pada sumber daya dan infrastruktur di lahan pasang surut, upaya alternatif untuk menanggulangi kemiskinan penduduk yang diduga memiliki keterandalan cukup tinggi adalah perbaikan tata air dan diversifikasi usahatani yang didukung oleh berbagai rekayasa sosial ekonomi. Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, rekayasa sosial ekonomi memiliki fungsi ganda, yaitu untuk mendukung rekayasa biofisik dan peningkatan mutu hidup (Gambar 2).



Gambar 2. Pendekatan Pengentasan Penduduk dari kemiskinan di Lahan Pasang Surut Kalimantan Selatan.

METODOLOGI PENELITIAN

Agar diperoleh hasil identifikasi sumberdaya dan infra struktur penentu kemiskinan dilahan pasang surut, maka penelitian kemiskinan sebaiknya menggunakan "zona agro ekosistem". Tingkat kemiskinan diterangkan dengan menggunakan suatu indek majemuk (composite index) dari sekelompok indikator sosial ekonomi, antara lain (1) status gizi, (2) tingkat kesehatan, (3) tingkat kematian balita, (4) tingkat pendidikan, (5) kualitas perumahan, dan (6) pendapatan per kapita.

Tahapan kegiatan penelitian meliputi studi referensi (desk study) dan pemahaman pedesaan dalam waktu singkat (PPWS).

1. Studi Referensi.

Studi ini dimaksudkan sebagai penuntun dalam pelaksanaan studi lapang pada waktu PPWS. Dengan menggunakan informasi awal yang diperoleh dapat dilakukan uji silang (cross check) di lapang sehingga hasil PPWS menjadi lebih akurat.

Studi referensi diawali dengan pengumpulan data dan informasi naratif yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder yang diperoleh, baik dalam bentuk publikasi maupun yang belum dipublikasikan, kemudian dievaluasi, dianalisa, dan diinterpretasi secara tajam. Informasi yang bersifat naratif juga dikaji dan dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai.

Studi referensi ini dilaksanakan oleh suatu tim interdisiplin yang meliputi pakar biofisik, seperti ilmu tanah, agronomi, pemuliaan tanaman dan hama penyakit, maupun sosial ekonomi, baik sosiologi pedesaan maupun ekonomi pertanian. Dengan demikian semua informasi yang relevan akan terjaring, teranalisis dan dapat diinterpretasikan secara lengkap dan tepat. Hasil yang diperoleh digunakan sebagai acuan tahapan penelitian berikutnya.

2. Rapid Rural Apraisal.

Rapid Rural Apraisal (RRA) atau Pemahaman Pedesaan dalam Waktu Singkat (PPWS) merupakan kegiatan penelitian yang sistematis agak terstruktur, dilaksanakan oleh tim antar disiplin dan dirancang untuk mendapatkan informasi baru. Dalam penelitian ini obyek yang dipilih adalah persoalan kesejahteraan penduduk di lahan pasang surut, khususnya di Propinsi Kalimantan Selatan.

Metode PPWS memiliki berbagai keunggulan, antara lain penggambaran dilakukan dengan pendekatan "sistem", sehingga unsur-unsur pokok dari obyek yang diamati dan interaksi sesamanya dapat diperhatikan secara cermat. Di samping itu, dalam PPWS pendekatan dan pengkerabatan kerja dilakukan secara multidisiplin, pemahaman dilakukan secara cepat dan berkembang, bersifat penggalan (exploratory) dan perulangan (iterative), menggunakan pengetahuan asli, fleksibel dan menggunakan penilaian yang tepat.

Penelitian diawali dengan penentuan topik. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke petani untuk melakukan diskusi secara umum, hasilnya kemudian didiskusikan dengan sesama anggota team. Tahapan berikutnya adalah kembali kelapangan dengan kwesioner yang sudah lengkap. Hasil yang diperoleh didiskusikan lagi dengan sesama anggota tim. Kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang. Tahapan terakhir adalah seminar dan pembuatan laporan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian pada tahapan ini, yaitu berupa pre-skripsi alternatif untuk meningkatkan pendapatan penduduk yang tergolong miskin, diharapkan dapat diuji keberhasilannya (workability) melalui penelitian lapangan (on-farm research), kemudian dilanjutkan dengan penelitian pengembangan dalam skala yang lebih luas, sehingga diperoleh rekomendasi tentang penanggulangan kemiskinan yang benar-benar sudah teruji keberhasilannya di lapangan secara baik.

KESIMPULAN

1. Masalah kemiskinan khususnya dilahan pasang surut perlu mendapatkan pemecahan segera. Hal ini dikarenakan persoalan ini dapat menghambat proses pembangunan selanjutnya, selain itu akan menurunkan kualitas dan produktifitas sumber daya manusia.
2. Untuk memecahkan persoalan kemiskinan di lahan pasang surut perlu dikaji secara mendalam baik mengenai tingkat kemiskinan itu sendiri maupun berbagai faktor penentunya, seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia dan infrastruktur. Kajian ini akan menghasilkan rumusan kebijakan untuk mengentaskan penduduk dari kemiskinan.
3. Salah satu metode penelitian kemiskinan yang paling tepat untuk digunakan adalah "integrasi" antara studi referensi dan pemahaman pedesaan dalam waktu singkat (PPWS). Studi referensi dilakukan sebelum PPWS dilak-

sanakan. Untuk operasionalisasi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan "action research".

4. Studi kemiskinan di Kalimantan Selatan masih terbatas kepada daerah-daerah tertentu. Namun pengembangan hasil studi dapat meliputi wilayah yang lebih luas di ekosistem lahan rawa dimana masyarakat miskin berada relatif homogen.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Dunia, 1990. What Do We Know About The Poor ? *Dalam:* World Development Report. The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank. Washington.
- BPS, 1990. Sensus Penduduk 1990, Biro Pusat Statistik. Jakarta.
- Mubyarto, 1981. Program Pemerataan. Tujuan dan Pengalaman. *Dalam:* Politik Pertanian. Yayasan OBOR. Jakarta.
- Prisma, 1976. Pemerataan Pendapatan Masyarakat; Impian atau Keharusan ? (Pe-ngantar Redaksi). LP3ES. Jakarta.
- Sajogyo, 1974. Usaha Perbaikan Gizi Keluarga. Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sumitro Djyohadikusuma, 1975. Indonesia Menuju Tahun 2000. PRISMA, No. 2, April 1975. LP3ES. Jakarta.

